

NASIB PEMBELI RUMAH DI ATAS TKD

# Sultan Tunggu Keputusan Pengadilan

**YOGYA (KR)** - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, penanganan penyalahgunaan Tanah Kas Desa (TKD) di DIY terus berlanjut dan diserahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum.

"Ndak, itu urusan hukum nanti. Yang penting pelakunya saja dari situ, nanti otomatis jadi saksi dan sebagainya. Soal apakah saksi itu jadi tersangka atau tidak itu kan nanti di pengadilan," kata Sultan HB X di Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (9/5).

Sultan mengatakan, soal penanganan kasus penyalahgunaan TKD, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwajib. Termasuk penentuan nasib pembeli rumah di atas TKD yang bermasalah, masih menunggu keputusan dari pengadilan. Begitu pula

dengan nasib bangunan perumahan yang sudah telanjur dibangun di atas TKD. Karena kewenangan berkaitan hal itu sepenuhnya ada di pengadilan, bukan di Pemda DIY. Untuk itu masyarakat sebaiknya menunggu keputusan pengadilan terlebih dahulu.

"Saya belum tahu kan ada keputusan pengadilan. Ya ndak tahu (nasib pembeli) saya. Nanti lihat keputusannya. Wong keputusannya saja di pengadilan belum ada," ujar Sultan. (Ria)-f

## Mahfud:

Sementara itu, Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Poli menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang yang menimbulkan korban sebanyak 20 warga negara Indonesia (WNI) ke Myanmar.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Poli Brigjen Polisi Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara yang dipimpin Kombes Pol Basuki Efendy.

"Hasil keputusan gelar perkara, terlapor atas nama Anita Setia Dewi dan Andri

Satria Nugraha ditetapkan sebagai tersangka," kata Djuhandhani.

Ia menjelaskan, penetapan kedua tersangka dengan alasan telah terpenuhinya unsur dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) Pasal 4 Undang-Undang (UU) No 21 Tahun 2007 dan/atau Pasal 81 UU No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Setelah penetapan tersangka, penyidik selanjutnya melakukan rencana tindak lanjut melengkapi administrasi penyidikan dan mengembangkan penyidikan untuk memastikan adanya tersangka lainnya. "Rencana tindak

lanjut mencari dan menangkap pelaku," kata Djuhandhani.

Kasus ini berawal dari laporan keluarga korban 20 orang WNI yang disekap di Myanmar ke Bareskrim Poli pada 2 Mei 2023. Laporan polisi dengan nomor LP/B/82/V/2023/SPKT/Bareskrim Poli tersebut langsung ditindaklanjuti dan dinaikkan status penanganannya ke tahap penyidikan, Senin (8/5).

Sebelumnya, sebanyak 20 orang WNI diduga jadi korban TPPO di Myanmar telah dibebaskan pada Sabtu (6/5) dalam dua tahap. Tahap pertama sebanyak empat orang dan tahap kedua sebanyak 16 orang. (Ful)-d

## Dituntut

Hakim menyatakan tidak ada alasan pemaaf dan pembenaan untuk Teddy. Hakim menyatakan Teddy terbukti terlibat menjual barang bukti sabu lebih dari 5 gram bersama Linda dan AKBP Dody Prawiranegara.

Hakim juga menyatakan Teddy terbukti mendapat keuntungan dari penjualan sabu tersebut senilai SGD 27.300 atau setara dengan Rp 300 juta. Hakim meno-

lak seluruh pembelaan atau pleidoi Teddy Minahasa. Hal memberatkan Teddy ialah tidak mengakui perbuatannya serta berbelit-belit dalam menyampaikan keterangan. Hakim juga menyatakan Teddy selaku polisi sebagai penegak hukum malah terlibat kasus narkoba.

Usai sidang pembacaan vonis, Teddy tampak terenyuh dan melambaikan tangan. Teddy langsung berdiri dari kursi

terdakwa dan menghampiri penasihat hukumnya, Hotman Paris Hutapea. Keduanya bersalaman dan berbicara. Kemudian, Teddy menghampiri dan menyalami tim penasihat hukum lainnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Iwan Ginting mengaku akan membahas untuk langkah ke depannya apakah akan ajukan upaya banding atau tidak. (Ant/Has)-d

## Dua

SMAN 1 Ngaglik telah selesai. Tidak lama kemudian, ada rombongan sekitar 20 sepeda motor berboncengan dari arah selatan. "Dari CCTV, terlihat serta merta rombongan pelaku ini lewat dan para pelajar di antaranya korban di pinggir jalan dianiaya secara acak. Kebetulan posisi korban ada di pinggir, sehingga terkena senjata tajam," ungkap Kapolresta di Mapolresta Sleman, Selasa (9/5).

Atas kejadian itu, korban lalu dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan, sedangkan pelaku melarikan diri. Polisi gabungan dari Polsek Ngaglik, Polresta Sleman dan Polda DIY menyelidiki kasus tersebut. Hasilnya, polisi mendapatkan titik terang pelaku pembacokan sehingga pencarian pun dilakukan.

"Diduga pelaku berada di rumah kemudian dilakukan penangkapan pada Selasa dini hari, selanjutnya pelaku dibawa ke kantor polisi. Adapun barang bukti yang disita antara lain clurit dan motor yang digunakan saat melakukan pembacokan," bebernya.

Dari hasil pemeriksaan, pelaku merupakan alumni salah satu sekolah di Kabupaten Sleman. Keduanya sengaja ikut konvoi rombongan pelajar dari sekolah mereka dulu untuk mencari sasaran. "Motifnya kejahatan jalanan dilandasi persaingan antarsekolah. Mereka konvoi di jalan dan jika menemui kelompok lain langsung melakukan aksinya," ujarnya.

Kapolresta mengaku heran dengan kedua pelaku, mengingat mereka sudah ti-

dak lagi bersekolah. "Saya heran, di antara mereka ada yang sudah punya istri, tapi ada yang merasa pernah sekolah di situ. Kemudian adik kelas merayakan kelulusan dan ikut-ikutan," tambahnya.

Kapolresta memastikan, aksi kedua pelaku sudah direncanakan karena telah mempersiapkan sjaam dari rumah. Salah satu tersangka mengakui membawa sjaam yang kemudian disembunyikan di bajunya. "Dulu waktu sekolah memang susah sekolah saya, sering bentrok di jalan," kilah tersangka. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 2 Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam hukuman 10 tahun dan Pasal 351 Ayat (2) KUHP ancaman 5 tahun. (Ayu)-d

## Tanah

Karena tanah di Yogyakarta mahal, investor akan mencari harga yang murah agar mudah menjual perorpertnya. Bertemunya penawaran dan permintaan yang meningkat, tanpa pengawasan yang kuat, menyebabkan kasus penyalahgunaan TKD akan berpotensi terus terjadi di masa depan.

Praktek penyalahgunaan TKD ini sebenarnya sudah berlangsung masif sejak reformasi. Sudah ada ratusan bahkan ribuan hektare tanah desa di DIY yang dikuasai individu selama puluhan tahun. Tanpa legalitas tanah tetapi memiliki bangunan permanen, sampai saat ini belum ada solusi. Pola lainnya, tanah desa diaku sebagai tanah pribadi oknum perangkat dan kemudian dijual ke pengembang.

Disertasi Wisnu Pradoto (2012) di TU Berlin misalnya, menyoroti perkembangan peri-urban area ke arah Utara Yogyakarta dimana perumahannya banyak menggunakan TKD. Namun karena penegakan hukumnya lemah, banyak penyalahgunaan TKD yang tidak diproses hukum.

Kondisi saat ini berbanding terbalik. Para pengembang nakal ini justru memanfaatkan Izin Gubernur sebagai legiti-

masi tindakan penipuannya. Modusnya juga semakin canggih karena menggunakan instrumen investasi vila yang terlihat menguntungkan dengan perjanjian di depan notaris. Jadi korbannya bukan hanya yang mencari hunian, tetapi yang mencari investasi. Dengan harga yang murah dan lokasi berkembang di Sleman. Gayung bersambut.

Persoalan bertambah rumit ketika birokrasi yang seharusnya mengawasi, tidak menindak diawal proses pembangunan. Hampir seluruh perumahan yang disegel tersebut kondisinya sudah berdiri kokoh, bahkan ada yang sudah selesai. Bagaimana solusinya?

Pertama, proses izin pemanfaatan TKD harus dikaji ulang dan menjadi prioritas serius pemerintah daerah, terutama di Sleman. Tanah adalah komoditas paling strategis di Yogyakarta sehingga birokrasi harus bekerja ekstra untuk mengontrol penggunaannya. Hal ini tidak mudah karena proses pemanfaatan TKD melibatkan perangkat desa. Perlu literasi yang memadai agar perangkat desa sampai level terendah memahami makna Pergub 34/2017. Apabila kontrol di level desa dapat dilakukan, maka proses selanjutnya akan lebih mudah.

Kedua, pemanfaatan semaksimal mungkin melibatkan masyarakat desa dan tidak semata-mata investor. Pola pembelian dengan BUMDes bisa menjadi alternatif. Investasi berdampak langsung pada kemakmuran desa dan tidak hanya dari sewa, dan penggunaannya dapat diawasi secara langsung warga desa dan investor juga tenang berinvestasi. Apabila hanya diserahkan pada investor tanpa melibatkan masyarakat desa, kondisinya seperti yang terjadi saat ini. Masyarakat diam saja ketika alat-alat berat hilir mudik di desa mereka karena menganggap semua perizinan sudah lengkap.

Tata krama yang mengutamakan harmoni dalam masyarakat Jawa membuat kontrol tidak terjadi karena masyarakat cenderung menghindari konflik. Sayangnya, pola harmoni ini yang justru dimanfaatkan pengembang nakal untuk melakukan pelanggaran.

Kontrol TKD tidak berarti menghambat investasi yang sangat dibutuhkan DIY. Penggunaan TKD yang tepat justru akan memberikan efek ekonomi berganda apabila semua pihak sadar hak dan kewajibannya.

(Penulis adalah ahli politik agraria UGM)-f

MOU APEX BPR/BPRS-BANK BPD DIY

# Semakin Kuat, Serap Teknologi



Jajaran Bank BPD DIY dan Pimpinan BPR/BPRS usai penandatanganan MoU.

**YOGYA (KR)** - Terus mendukung potensi UMKM di Yoga dengan eksistensi keberadaan BPR/BPRS DIY, ditandatangani MoU Apex BPR/BPRS dengan PT Bank BPD DIY, Selasa (9/5), di Ruang Istimewa Lt 7 Kantor Pusat Bank BPD DIY, Jalan Tentara Pelajar No 7 Yogyakarta. Apex bank merupakan konsep kemitraan BPR dengan bank umum maupun BPR yang semakin menguatkan BPR/BPRS.

"Setelah sebelumnya ada 10 BPR/BPRS di DIY menan-

datangi MoU, kini ada 15 BPR/BPRS di DIY yang bergabung kerja sama Apex dengan Bank BPD DIY. Total ada 25 BPR/BPRS telah bergabung dari sekitar 48 BPR dan 6 BPRS di DIY," tutur Direktur Pemasaran Bank BPD DIY Agus Trimurjanto.

Agus didampingi Direktur Kepatuhan Dian Ariani dan Direktur Umum Hudan Mulyawan dengan disaksikan Ketua Perbarindo DIY Wulfrim Margono, menandatangani MoU bersama 15 direktur/perwakilan BPR/BPRS yakni BPR

Nusamba Temon, BPR Madani Sejahtera Abadi, BPR Shinta Daya, BPR Nusumma Jogja, BPR Berlian Bumi Arta, BPR Kurnia Sewon, BPR Danamas Prima, BPR Artajaya Bhaktimulia, BPRS Mitra Harmoni, BPR Arta Agung Yogyakarta, BPR Restu Artha Yogyakarta, BPR Wijayamulya Santosa, BPR Nusamba Banguntapan, BPR Arum Mandiri Melati, dan BPR Nusantara Artha Makmur.

"Apex Bank BPD DIY dalam rangka menciptakan kerja sama melindungi/mengayomi dan saling menguntungkan serta memperluas pelayanan dan sinergi pada UMKM dan mendukung pengembangan ekonomi daerah. Tujuan Apex membantu BPR/BPRS dalam fasilitas dana likuiditas dan dana bergulir, bidang pembiayaan berupa linkage program, pemanfaatan teknologi informasi Bank BPD DIY dan bantuan teknis peningkatan kapasitas SDM," jelasnya. (Vin)-f

BANK MANDIRI TASPEN

# Luncurkan Fitur QRIS pada Aplikasi Movin

**JAKARTA (KR)** - Bank Mandiri Taspen sadar betul ke depan kemadirian nasabah dalam bertransaksi menjadi hal yang sangat penting. Karena itu perseroan meluncurkan QR Code Indonesian Standard (QRIS) untuk meningkatkan layanan kepada nasabah.

"Bank Mandiri Taspen secara masif melakukan digitalisasi fitur-fitur perbankan yang memudahkan para nasabah, dimana sebagian besar mereka pensiunan, untuk melakukan transaksi tanpa harus datang ke kantor cabang," ungkap Maswar Purnama, Direktur Bisnis Bank Mandiri Taspen, di JCC, Jakarta, Selasa (9/5).

Sebanyak 215,63 juta penduduk Indonesia sudah menjadi pengguna internet saat ini. Pengguna berusia 55 tahun ke atas mencapai 51,73 persen.



Peluncuran QRIS Bank Mandiri Taspen pada aplikasi Movin.

"Dari sisi bisnis, ini menunjukkan peluang yang sangat besar bagi perbankan di Indonesia. Fitur QRIS juga untuk mendukung Bank Indonesia dalam pengembangan QRIS, serta cashless society," jelas Maswar.

Dikatakan, bank dituntut untuk bisa memenuhi kualitas layanan yang mandiri (self-service) sehingga nasabah tidak perlu lagi datang ke kantor bank untuk melakukan tran-

saksi. "Nasabah telah menjadi pusat aktivitas dan transaksi perbankan," ujar Maswar.

Menurut Maswar, fitur QRIS pada Movin by Bank Mandiri Taspen ini sangat mudah dioperasikan.

"Kami sangat mengenal dan menghargai nasabah, sehingga dalam menghasilkan servis pun kami mendahulukan kemudahan dan kenyamanan mereka," tuturnya. (Ogi)-f

## DIY

Mengenai upaya pencegahan potensi kerawanan agar tidak benar-benar terjadi, menurut Najid harus ada upaya untuk edukasi ke masyarakat dan menutup pintu kesempatan terjadinya pelanggaran. Karena pelanggaran apapun itu terjadi karena ada niat dan kesempatan. "Dua pintu itu harus ditutup," tandasnya.

Terkait adanya kandidat calon presiden yang melakukan orasi, Bawasu belum bisa menyebutkan sebagai subjek hukum. Lantaran mereka belum ditetapkan sebagai calon oleh KPU. Saat ini yang baru menjadi subjek hukum baru parpol. Jika yang pidato, parpol atau pengurus, baru bisa menjadi target Bawasu. (Awh/Bro)-f

## Menag

Faktor lain yang perlu diperhatikan dalam pembagian kuota haji, adalah tingkat pelunasan biaya perjalanan ibadah haji. "Ini bisa menjadi pertimbangan agar kuota bisa terserap optimal," ujarnya.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief mengatakan, sebanyak 7.360 tambahan kuota akan diperuntukkan bagi haji reguler dan 640 lainnya untuk haji khusus.

Kriteria calon haji reguler yang dapat memanfaatkan kuota tambahan antara lain berstatus cilik aktif, belum pernah menunaikan ibadah haji atau belum menunaikan ibadah haji dalam setidaknya

10 tahun terakhir serta berusia minimal 18 tahun pada

24 Mei 2023 atau sudah menikah. (Ati/Ant)-d



Prakiraan Cuaca					Rabu, 10 Mei 2023	
Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Dini Hari	Suhu C	Kelembaban
Bantul	☁	☁	☁	☁	23-31	70-95
Sleman	☁	☁	☁	☁	23-30	75-95
Wates	☁	☁	☁	☁	23-31	70-95
Wonosari	☁	☁	☁	☁	23-30	70-95
Yogyakarta	☁	☁	☁	☁	23-31	70-95



**Rosyidah Jayanti Wijaya, SE MHum**  
Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta

**MANUSIA** adalah makhluk berwarna yang setiap harinya dihinngapi banyak perasaan: rasa bahagia, sedih, marah, takut, kecewa, dan lain sebagainya. Ingatkan, kapan terakhir pembaca merasakan bahagia, senang, sedih, marah,

kecewa, atau cemas? Apakah diperlukan usaha tertentu untuk mengatasinya?

Seperti biasanya, walau bulan Ramadhan sudah berlalu dan Hari Raya Idul Fitri pun telah lewat, perjuangan setiap manusia menjadi makhluk yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya dalam mengelola perasaan terus berlangsung. Kenapa perasaan penting untuk dikelola? Kemampuan mengelola perasaan membuat manusia mampu bertahan hidup, menghindari ancaman bahaya, dan mengambil keputusan yang lebih tepat. Sebaliknya, banyak kejadian yang tidak mengenakkan terjadi hanya karena seseorang tidak mampu mengelola perasaannya, misalnya bagaimana seseorang melakukan tindak

kejahatan atau melakukan hal yang berbahaya bagi orang lain hanya karena orang tersebut tidak bisa mengelola perasaan marah dan kecewanya, tidak jarang pula hal berbahaya terjadi di saat orang sedang berpesta dan bersenang-senang. Semua itu dapat terjadi karena setiap orang memberikan respon tertentu yang berbeda terhadap perasaan yang ia alami. Inilah alasan kenapa seseorang memerlukan kemampuan dalam mengelola perasaan sehingga tidak salah bertindak atau memutuskan sesuatu dan bisa mencapai tujuan yang direncanakan.

Usaha mengelola perasaan sehingga dapat memberikan respon yang lebih tepat terhadap perasaan tertentu dan dapat membantu mencapai tujuan yang

diharapkan dapat dilakukan dengan banyak cara, salah satunya adalah dengan membangun "self regulation" yaitu kemampuan untuk mengendalikan perilaku melalui "self-monitoring, self-evaluation, dan self-reinforcement" (American Psychological Association). Secara sederhana, self regulation dapat diartikan sebagai pengaturan atas diri sendiri. Jaime R. Herndon, seorang penulis bidang kesehatan, dalam salah satu artikelnya menyebutkan empat aspek yang menunjukkan pentingnya self regulation, yaitu aspek fisik, emosional, mental, dan sosial. Aspek fisik membantu seseorang untuk mencegah dorongan dalam menggunakan kekuatan fisik untuk mengatasi masalah terutama saat mengalami rasa

sedih, marah, atau kecewa dan memilih cara bereaksi yang lebih tepat. Aspek emosional membantu seseorang untuk bereaksi lebih tenang, mengatur perasaan, dan berperilaku sewajarnya sehingga tidak merasa terbebani dengan situasi tertentu dan memungkinkan untuk menjadi lebih produktif. Aspek mental lebih mengarahkan seseorang pada bagaimana agar dirinya mampu belajar dan melakukan sesuatu dengan lebih baik. Hal ini membantu seseorang untuk fokus pada apa yang sedang dikerjakannya baik saat di sekolah, kuliah, maupun bekerja. Aspek sosial menunjukkan bagaimana "self regulation" membantu seseorang untuk berperilaku wajar dan membangun hubungan yang baik dengan

orang lain. Melatih dan membangun "self regulation" dapat dilakukan dengan berbagai cara. Selain berdoa, yoga, dan bermeditasi, dapat juga dipraktekkan antara lain memberikan waktu sebelum bereaksi terhadap sesuatu yang dianggap mengejutkan atau di luar perkiraan dengan cara menarik nafas dalam kemudian dilepaskan kembali (open shut), menggosokkan kedua telapak tangan (fire arm), meletakkan telapak tangan di dada, merasakan detak jantung dan naik turunnya dada sambil menarik nafas (hand over heart), menggerakkan bahu kanan dan kiri secara bersamaan atau bergantian (shoulder shrug), atau menyalangkan



tangan di depan memegang bahu sambil menarik napas (hawk hug).

Kemampuan untuk mengatur diri adalah salah satu cara kita untuk menjaga diri dan Allah menyukai makhluknya yang pandai menjaga diri seperti terkandung dalam Al Quran surah Al-Maidah ayat 105 yang mengisyaratkan betapa pentingnya manusia menjaga diri. Semoga dengan meningkatnya kemampuan kita dalam membangun "self regulation", meningkat pula kemampuan kita dalam beradaptasi terhadap lingkungan dan mengarahkan diri sendiri sesuai dengan kebutuhan. \*\*\*